

BAB II

KAJIAN TIORI

A. Konsep Tiori

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang melakukan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹

Menurut Marry Parker Follet mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: “*the art of getting things done through people*” artinya manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang².

Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry L. Sisk pada buku *Principles of Management* mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: “*Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives*”³ Manajemen berupa mengkoordinasikan

¹Husaini Usman, *Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet 2, hlm. 4

²*Ibid*, hlm. 3

³Henry L. Sisk, *Principles of Management* (Brighton England: South-Western Publishing Company, 1969), hlm. 10.

semuasumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif.

Menurut Sergiovanni, Barlingome, Coonbs dan Thurton mendefinisikan manajemen sebagai “*process of working with and throughothers to accomplish organizational goals efficiently*”. Yaitu proses terjadinya dan melalui (memberdayakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Oleh karena itu, definisinya merupakan proses terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Gorton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu⁴ Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Manajemen adalah suatu istilah yang sulit didefinisikan dan pekerjaan manajer sulit untuk didefinisikan secara tepat (persis) ada sejumlah teori yang dimajukan bersama dengan sangat banyak deskripsi berdasarkan observasi karena sulitnya maka batas-batas manajemen pendidikan tidak jelas.⁵

⁴ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), cet 2, hlm. 39.

⁵ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 16-17.

Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan⁶

Longnecker & Pringle merumuskan manajemen sebagai proses memperoleh dan menggabungkan sumber-sumber manusia, finansial dan fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi menghasilkan produk atau jasa/layanan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat⁷

Buford dan Bedeian manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efisien⁸

Ricky W Griffin manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien⁹

Million Brown mengatakan, *“Management mean the affective use of people, money, equipment, material, and method to accomplish a specific objective* (manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-

⁶ T Hani Handoko *“Manajemen”* (Yogyakarta: BPFE, 2003) Cet. 18, h. 8

⁷ Marno dan Triyo Supriyatno *“Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam”* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) Cet. 1, h. 1

⁸ Syaiful Sagala *“Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, strategi memenangkan persaingan mutu”* (Jakarta: PTNimas Multima, 2004) Cet. 1, h. 15

⁹ Irham Fahmi *“Manajemen, Teori Kasus dan Solusi”* (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 2

orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara afektif untuk mencapai tujuan)¹⁰

Suwardan manajemen merupakan usaha yang sistematis dalam mengatur dan menggerakkan orang-orang yang ada di dalam organisasi agar mereka bekerja sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya¹¹

Sedangkan menurut beberapa pakar manajemen diberikan batasan mengenai pengertian manajemen:

1. Menurut Robert Kresther, manajemen adalah proses kerja dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan.
2. George Terry mengemukakan bahwa kemampuan menyuruh orang lain bekerja guna mencapai tujuan.
3. Menurut James A.F. Stonner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Sondang Sangian mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.
5. Menurut Ricard M. Hodgetts dan Steven Ultman manajemen adalah suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.
6. Menurut Donnelly manajemen adalah proses koordinasi upaya terhadap tujuan kelompok.

¹⁰ Didin kurniadin dan imam machali “*Manajemen Pendidikan*” (jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012) h. 25

¹¹ Barnawi dan M. Arifin “*Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*” (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012) h. 14

Menurut J.L. Massie, manajemen adalah proses satu kelompok kooperatif menggerakkan tindakan untuk tujuan umum.

1. Kemampuan mempengaruhi
2. Orang, bawahan
3. Melakukan pekerjaan
4. Tujuan organisasi
5. Kerja sama antara bawahan dengan pimpinan
6. Terbatasnya sumber daya.¹²

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam yang sesuai dengan unsur-unsur manajemen.

Berikut ini dapat kita lihat mengenai manajemen dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Firman Allah SWT.


 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (74: 38.)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَتْهُمْ بَنِينَ مَرَّضُونَ

61. 4. *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*

¹²Soebagio Atmodiwiryo, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), hlm. 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

23.8. dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Dari dua ayat Al-Qur'an diatas tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari seluruh sumber ilmu pengetahuan, bahkan ilmu yang baru berkembang akhir-akhir ini sudah tertera dalam Al-Qur'an dan diterapkan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu kala. Sehingga bentuk penerapan Manajemen Qur'ani atau manajemen yang bersifat Islami sudah ada sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW.

Fungsi-fungsi manajemen dikemukakan oleh beberapa ilmunya seperti George R. Terry menjadi 5 tahapan atau unsur manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling yang disingkat menjadi POAC. Louis A. Allen menyatakan dalam bukunya Management and Organization tentang Element of Management terdiri dari Planning, Organizing, Coordinating, Motivating, dan Controlling sehingga disingkat menjadi POCMC dan masih banyak unsur manajemen lainnya yang dikemukakan ilmuan lainnya.

Dalam Al-Qur'an sendiri manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh beda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah

tertuang dalam Al-Qur'an sebagai falsafah hidup umat islam. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Planning

At-Tahthiith atau perencanaan dari suatu kegiatan yang akan datang dengan acuan waktu atau metode tertentu. Seperti sabda Nabi SAW yang artinya :

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan dengan itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas). (HR. Thabrani).

Lebih sederhananya lagi Allah berfirman dalam surat Al Insyirah (94:7-8):

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧٨﴾

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

2. Organizing

At-Tandziim atau pengorganisasian merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertical maupun horizontal. Dalam surat Ali Imran Allah SWT berfirman ayat 103 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٢٤﴾

dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Ayat diatas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaklah bersatupadulah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk mencapai cita-cita dalam satu payung organisasi dimaksud.

3. Coordinating

At-Tansiiq atau pengoordinasian, merupakan upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang di idamkan. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah (2:208):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

208. *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

Apabila manusia ingin mendapatkan predikat iman maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman apabila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai planning dan aturan-aturan yang mengikat manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya koordinasi yang baik dan efektif sehingga tercapainya tujuan yang ideal.

4. Controlling

Ar-Riqaabah atau pengendalian adalah pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan harus lebih baik dari anggotanya, sehingga control yang ia lakukan akan efektif. Firman Allah SWT dalam surat At Tahrim (66:6)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama manajer, baik organisasi keluarga maupun organisasi universal. Bagaimana manajer bisa mengontrol orang lain sementara dirinya sendiri masih belum terkontrol. Dengan demikian seorang manajer orang terbaik dan harus mengontrol seluruh anggotanya dengan baik.

2. Pengertian pembiayaan

Poerwadarminta mengemukakan pembiayaan adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu. Atau dikatakan juga membelanjakan, mengeluarkan uang untuk biaya.¹³

Keberadaan biaya dalam suatu organisasi merupakan sektor yang begitu penting keberadaannya, dalam hal menunjang segala kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Terkhusus dalam dunia pendidikan, biaya merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berjalan di sekolah. Baik dalam kategori mikro ataupun makro. Sebaik apapun program yang telah direncanakan di sekolah tanpa adanya biaya tidak akan dapat berjalan. Hanya terbengkalainya kegiatan yang telah direncanakan dengan sematang mungkin, karena tidak didukung dengan biaya yang memadai. Karena biaya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menunjang proses berjalannya suatu kegiatan. Segala hal yang berkaitan dengan proses kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari biaya.

¹³ Tim penyusun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa “*Kamus besar bahasa Indonesia*”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1995.

Menurut *Ensiklopedia Nasional Indonesia* mendefinisikan bahwa biaya adalah nilai barang dan jasa yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan atau pendapatan¹⁴

Agus Irianto mendefinisikan Biaya pendidikan sebagai salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).¹⁵

Dari beberapa pengertian biaya diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa biaya adalah seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk barang atau uang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang bermutu dapat diukur dari cara kerja yang dilakukan. Salah satu faktor penentu tercapai tujuan pendidikan yang bermutu yaitu melalui pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi pada bidangnya. Guru merupakan ujung tombak pada proses pelaksanaan pendidikan.

¹⁴ Mulyono “*Konsep Pembiayaan Pendidikan*” (Jogjakarta, Ar-ruzz media, 2010), Cet. 1, h. 89

¹⁵ Agus Irianto ”*Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu Bangsa*” (Jakarta: Kencana, 2011), h. 161

Penghasilan yang diperoleh oleh pendidik dan tenaga kependidikan dapat mempengaruhi konsentrasi dalam melaksanakan proses kegiatan pendidikan yang berjalan di sekolah.

Penghasilan guru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akan menghilangkan beban pemikiran rumah tangga dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan di sekolah. Sebaliknya, minimnya penghasilan yang diperoleh guru dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berjalan di sekolah, terlebih berpengaruh dalam konsentrasi pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Karena memang terfokus pada kebutuhan rumah tangga yang harus dicukupi kebutuhannya.

Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara¹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁶ Sarbini & Neneng Lina "Perencanaan Pendidikan" (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet.1, h. 20

Dari definisi pendidikan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan, pendidikan ialah usaha/proses mewujudkan suasana pembelajaran yang

sistematis agar peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan baik oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pengertian biaya dan pendidikan di atas yang kemudian disatukan dan didapat sebuah kesimpulan bahwa Pembiayaan Pendidikan merupakan seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk barang atau uang yang diberikan oleh pemerintah, orang tua murid, ataupun masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang sistematis agar peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan baik oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anggaran pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang satu sama lainnya saling berhubungan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan yaitu pendapatan yang diterima setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Misalnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pada pihak sekolah dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran pengeluaran ialah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sekolah memberikan pelayanan secara maksimal dengan cara memanfaatkan segala sumber bantuan yang ada, baik berupa uang ataupun barang yang telah diterima. Dipergunakan sesuai dengan kebutuhan di sekolah, dalam pelaksanaan program untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Dalam hal konsep pembiayaan pendidikan tidak hanya sebatas seberapa besar pengeluaran yang akan dikeluarkan, akan tetapi segala hal yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai terjadi pemborosan dalam hal pengeluaran biaya yang dikeluarkan/belanjakan. Karena pada dasarnya konsep pembiayaan yang baik ialah penggunaan biaya secara minim, akan tetapi mencapai hasil yang maksimal.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya Langsung (*direct cost*) ialah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.

Biaya Tidak Langsung (*indirect cost*) ialah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Misalnya, biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan.

Dedi Supriadi mendefinisikan Biaya pendidikan sebagai salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa biaya dapat dikelompokkan menjadi dua macam. *Pertama*, biaya langsung penunjang proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan di sekolah. Contohnya seperti proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. Hal yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yaitu buku panduan pembelajaran. Untuk menyampaikan materi ajar dengan mudah maka dibutuhkan buku panduan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Buku panduan ini dapat dimiliki jika sudah melunasi administrasi di sekolah. *Kedua*, biaya tidak langsung yang tidak sengaja dikeluarkan akan tetapi menunjang proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan di sekolah. Contohnya ialah foto copy, pembuatan makalah dalam pelaksanaan belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pater Salim dan Yenny Salim mengartikan pembiayaan ialah dengan mengongkosi, mengeluarkan ongkos untuk biaya. Seperti dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar untuk membiayai pembuatan pendidikan.

Menurut Elchanan Cohn pembiayaan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok membuat keputusan dalam rangka memperdayakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) dikemukakan biaya ialah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dsb.) sesuatu ; ongkos, belanja, pengeluaran. Atau menggunakan uang (uang) untuk sesuatu ; membelanjakan. Jadi pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Menurut Nanang Fattah pembiayaan adalah pengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga jumlahnya.

Menurut Thomas H. Jones pembiayaan adalah pengalokasian sumber-sumber yang langka (*scarcity*) untuk mencapai tingkat kepuasan yang setinggi-tingginya.

Paul A. Samuelson mengemukakan pembiayaan adalah sumber-sumber yang langka, baik dalam bentuk barang yang kongkrit (*tangible*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maupun jasa atau barang yang sifatnya abstrak (*intangible*) dalam memenuhi kebutuhan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat.

Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata *finance* dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan. Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin.¹⁷

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005 terdiri atas 3 bagian besar yaitu:

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya Operasional yang meliputi:

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai

¹⁷Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan*, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm.130

- c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi sumber dana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orang-tua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan sekolah.¹⁸

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan

¹⁸Redaksi Sinar Grafika, *Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.¹⁹

Masalah keuangan/Pembiayaan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber

¹⁹*Ibid*, hlm. 171-172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan diberikan secara Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu di lakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut.

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.²⁰

Jadi, manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa.

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis MBS. Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan antara penambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang hampir dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi mutu kinerja sekolah, seperti kompetensi guru, lingkungan belajar, tingkat social ekonomi orang tua, dan lain-lain. Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud

²⁰E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 193-194

pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.²¹

Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa, transportasi, jajan dan kesehatan.

3. Pengertian Pendidikan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan perhatian.

Menurut Nanang Fattah mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kepribadian manusia dengan kegiatan belajar yang dirancang secara sadar dan sistematik dalam intraksi antara pendidikan dengan peserta didik.

Selanjutnya Nanang Fattah mengemukakan pendidikan adalah memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara-cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas.²²

²¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). hlm.48

²²Nanang Fattah, *landasan manajemen pendidikan*, penerbit: pt remaja rosdakarya, 2004

Kemudian beliau menambahkan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja yang terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal dilakukan sejak manusia lahir. Sedangkan pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan lain yang diselenggarakan di sekolah.

Pendapat Langeveld yang dikutip oleh Kartini Kartono mengemukakan pendidikan (pedagogi) adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju kepada kedewasaan dan kemandirian. Selanjutnya ia memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah pemberian bantuan rohani bagi yang masih memerlukan.²³

Selanjutnya beliau mengemukakan lagi pendidikan adalah semua usaha pengarah, perlindungan, serta bantuan harus diberikan terjuts kepada kedewasaan anak didiknya, atau dengan kata lain membantu anak agar cukup dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain.

Menurut John Dewey, yang dikutip oleh Hafi Anshari pendidikan adalah suatu proses pengalaman dan pertumbuhan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²³ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*, penerbit Rosda 2009

penyesuaian pada tiap-tiap fase untuk menambah kecakapan di dalam perkembangan seseorang.²⁴

Menurut Khursid Ahmad, yang dikutip oleh Hafi Anshari mengemukakan pendidikan adalah memberikan informasi dan pengetahuan serta mengembangkan bakat yang terpendam pada diri anak didik.

Jamil Shaliba mengemukakan pendidikan (Arab ; al-Tarbiyah, Prancis ; education, Inggris ; education, cultur, Latin ; educatio) adalah mengembangkan fungsi-fungsi psikis latihan sebagai mencapai kesempurnaannya sedikit-demi sedikit.²⁵

Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si Pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani di terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 1 mengemukakan pendidikan adalah usaha sadar buntut menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya masa yang akan datang.

4. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

²⁴ Hafi Anshari, Kamus Psikologi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hlm. 482

²⁵ Jamil Shaliba, penulis buku al-Falsafah al-'Arabiyyah (*Filsafat Arab*, 1970)

²⁶ Ahmad D Marimba *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* pt al ma'arif bandung 2009

Menurut Psacharopoulos mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang.²⁷

Menurut F. Harbison C. Meyers pembiayaan pendidikan merupakan subjek dari konsepsi SDM melalui pendidikan dan latihan agar kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat.²⁸

Made Pidarta menjelaskan ada tiga hal yang perlu direncanakan pembiayaan pendidikan, yaitu :

1. Perencanaan secara tradisional, yaitu dengan menentukan macam-macam kegiatan pendidikan, kemudian masing-masing kegiatan ditentukan biayanya.
2. SP4 (Sistem Perencanaan Penyusun Program dan Penganggaran) Pengaturan jenis-jenis kegiatan dilakukan secara sistem, atau lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem dari segi pembiayaan.
3. ZBB (Zero Base Budgeting). Hanya direncanakan untuk satu tahun anggaran.²⁹

²⁷ Psacharopoulos, *Pembiayaan Pendidikan Ekonomi*, Pendidikan dan Ekonomi (1987:397), penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mantra

²⁸ Harbison, F., dan Myers, A. Charles *Pendidikan untuk Pertumbuhan Ekonomi*, Education, Manpower, and Economic Growth, Strategies of ... Penerbit Ganaco NV, Bandung 2009

²⁹ Made Pidarta. *Manajemen Pendidikan*. Penerbit, : Rineka Cipta. 2014

Wahjosumidjo menjelaskan dana pembiayaan pendidikan tergantung pada; (1) kondisi masyarakat di mana madrasah berada, (2) kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan, dan (3) dana yang dialokasikan tidak sesuai atau memenuhi harapan tinggi yang dibebankan kepada madrasah.

Menurut Jusuf Enoch dalam merencanakan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan daya tampung, yaitu ; (1) penambahan ruang kelas atau sekolah yang baru, (2) pengangkatan guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi, (3) pengadaan buku teks dan buku perpustakaan, (4) pengadaan fasilitas lainnya, (5) pengadaan alat-alat keterampilan, alat olah raga, dan alat kesenian, (5) pengadaan listrik dan air, dan (6) biaya operasional tahunan termasuk pemeliharaan gedung sekolah dan alat-alat.³⁰

Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab; sesama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses dalam mengatur manusia, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara afektif untuk mencapai tujuan tertentu melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara

³⁰ Jusuf Enoch. ..., *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

terus-menerus dan konsekuen. Hal ini menjelaskan bahwa manajemen dapat berjalan melalui orang lain, uang, perlengkapan, barang, dan metode, secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa manajemen ialah suatu proses mengatur orang lain mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi yang dilakukan secara berkala agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut pendekatan manajemen, pembiayaan pendidikan merupakan sebuah pondasi dasar dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar pendidikan yang di buat oleh pemerintah, sebagai prasyarat mencapai pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan memiliki komponen dalam kaitannya yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya rutin sekolah.

Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Akan tetapi pembiayaan pendidikan

mempunyai kajian tersendiri dalam kaitannya, dan mempunyai fungsi dalam prosesnya. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu bagaimana memperoleh biaya dan bagaimana mempergunakan biaya tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Manajemen pembiayaan pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya, Begitu juga minimnya biaya yang terdapat dalam lembaga pendidikan dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan yang telah ditentukan. Biaya merupakan sebuah ruh dalam setiap kegiatan yang ada. Tanpa ada biaya segala kegiatan yang telah direncanakan sebaik mungkin tidak akan dapat berjalan.

Suatu biaya penting keberadaannya dalam organisasi, terlebih pada dunia pendidikan. Akan tetapi bukan dari seberapa besar biaya yang akan dipergunakan atau yang dikeluarkan melainkan biaya tersebut direncanakan untuk apa, dan bagaimana cara pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut. Artinya segala hal yang akan dilakukan harus sesuai dengan segala literatur yang telah diencanakan sejak awal. Apabila mendapati segala yang terjadi dalam proses berjalannya maka harus segera di musyawarahkan dan secepatnya mencari alternatif jalan keluar yang baik.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada sistem pendidikan. Tanpa adanya biaya yang mendukung pada proses pelaksanaan pendidikan, pendidikan yang bermutu hanya dalam angan-angan semata. Segala hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan disekolah berkaitan dengan biaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.

5. Pengertian Madrasah

Menurut Harun Nasution madrasah diartikan sebagai tempat ilmu-ilmu keislaman terutama ilmu fiqh. Kata madrasah berakar dari kata kerja darasa yang berarti belajar atau darrusa (mengajar). Istilah madrasah pertamaa dipakai atau diupayakan pada masa khalifah Abbasiyah (Harus Arasyid) di mana beliau menyediakan ilmu kedokteran saebagai penipang di lingkungan klinik.³¹

Menurut John L. Esposito madrasah didirikan sebagai ntempat belajar mengajar ilmu-ilmu Islam dan sebagai tempat studi lanjut.³²

Madrasah bukan lembaga pendidikan asli Indonesia tetapi berasal dari dunia Islam di Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke 10 M. madrasah berkembang sebagai simbol kebangkitan mazhab Sunni (suatu aliran Teologi/Kalam dalam Islam), dan

³¹ Nasution, Harun, 1975, *Pembaharuan Dalam Islam*., Bandung, Penerbit Angkasa.

³² John L. Esposito *Desain Pengembangan Mutu Madrasah - Penerbit: Mizan* (1999)

merupakan lembaga tradisional yang sudah banyak di modernkan di Indonesia.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan berbasis Islam yang mempunyai sistem perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pendanaan, pengontrolan, tenaga pengelola dan lain-lain sebagaimana layaknya lembaga pendidikan yang umum, namun secara spesifik sebagai wadah yang bertujuan memfasilitasi pengembangan ajaran Islam.

3. Sumber Pembiayaan Madrasah

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.³³

Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

- a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan,

³³Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2003), hlm. 5-6

baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.

- b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF, Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
- c. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.

Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela.

Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara incidental guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah.³⁴

³⁴Harbangan Siagian, *ibid*, hlm. 133.

Jadi pendapatan madrasah selain bersumber berasal dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela.

4. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Madrasah

Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, manajemen pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan menjadi bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Tahap pertama dalam fungsi manajemen adalah tahap perencanaan. Perencanaan ialah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak akan dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan itu secara efektif dan efisien mungkin (Roger A. Kauffman, 1972)³⁵

B. Suryosubroto perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber, yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan sumber meliputi sumber manusia, material, uang, dan waktu³⁶

Dari defeni diatas dapat diambil sebuah kesimpulan perencanaan ialah proses pengumpulan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Depdiknas manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan

³⁵ Nanang Fattah “*Landasan Manajemen Pendidikan*” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. 8. h. 49-50

³⁶ B. Suryosubroto, “*Manajemen Pendidikan di Sekolah*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),Cet. 2 h. 22

pembelajaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan sekolah³⁷

Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan.

Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.³⁸

Dapat dikatakan bahwa fungsi dari manajemen keuangan salah satunya yaitu menyangkut tentang merencanakan uang yang akan dialokasikan untuk hal apa, dalam hal ini bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan kedepannya.

Mengenai konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman tersebut dimaksud merentang dari hal-hal sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional) antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Jamal Ma'mur Asmani "Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional" (jogjakarta: DIVAPress, 2012), h. 178

³⁸Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 46.

pengalokasiannya. Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan, dan akuntabilitas hasilnya yang di ukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya ditingkat sekolah³⁹

Perencanaan tidak hanya sebatas pada memikirkan dan menetapkan, akan tetapi seberapa hasil dari proses kegiatan program yang telah dijalankan disekolah. Program yang telah dilaksanakan telah mencapai sasaran atau tidak. Jika memang telah mencapai sasaran maka perencanaan berjalan dengan baik. Dan jika perencanaan tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan maka perencanaan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada dasarnya anggaran adalah alat dalam suatu perencanaan pembiayaan pendidikan. Anggaran dalam pembiayaan pendidikan harus mempunyai prinsip dasar yang jelas dalam perencanaan pembiayaan pendidikan.

Prinsip dalam perencanaan anggaran menurut nanang Fattah yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Dedi Supriadi, “*Satuan Biaya Pendidikan*” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010) Cet, 5 h. 7

- 2) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
- 3) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
- 4) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.⁴⁰

Dari prinsip di atas dapat dikatakan bahwa penyusunan anggaran melibatkan beberapa sumber daya manusia dalam perencanaannya. Dilain hal, dukungan akuntansi/pembukuan sangat diperlukan sekali dalam penyusunan anggaran. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi segala pengeluaran ataupun pemasukan biaya yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Dalam membuat suatu perencanaan, orang menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Kesulitan dalam meramalkan.
2. Kesulitan dalam pembiayaan.
3. Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi.
4. Kurang jelasnya tujuan.²⁴

Jika suatu saat ditemukan permasalahan diatas dalam merencanakan suatu program atau kegiatan harus segera dicari

⁴⁰ Nanang Fattah, "Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan" (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006) Cet. 4 h. 49

alternatif jalan keluarnya. Dengan cara dimusyawarahkan bersama-sama mencari jalan penyelesaian atau jalan keluar masalah yang baik.

Manajemen pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Landasan dasar dalam pembuatan RAPBS meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran.

Pada suatu lembaga pendidikan hal yang harus dilakukan dalam mengelola pembiayaan di sekolah adalah dengan membuat perencanaan anggaran atau biasa disebut sebagai Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS). Kepala sekolah dan seluruh bawahan bersama-sama menyusun RAPBS. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendapatan dan pengeluaran yang akan dijalankan selama satu tahun, sehingga suatu kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan sekolah atau anggaran belanja sekolah menurut Morphet sebagai berikut :

1. Mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.
2. Melakukan perbaikan terhadap peraturan dan input lain yang relevan dengan merancang pengembangan sistem secara efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan pengawaasan dan penilaian terhadap proses dan hasil secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap

berikutnya Pihak sekolah harus mempunyai rencana dari mana biaya yang akan diperoleh untuk menjalankan proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berjalan disekolah. Selain itu, segala hal yang menyangkut tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia baik dalam kategori formal ataupun non formal yang berjalan disekolah harus mencari donatur untuk mendukung terlaksananya program yang akan dijalankan diekolah. Dukungan dalam bentuk moril ataupun materil. Agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Setelah pendapatan biaya telah diperoleh dari berbagai pihak selanjutnya merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan/program yang akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk menciptakan kehidupan sekolah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti, mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, dan efisien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal yang menyangkut dengan pembiayaan di Sekolah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal merencanakan, melaksanakan, atau mengawasi segala kegiatan pembiayaan. Menetapkan tujuan yang akan dicapai, kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang kemudian diawasi segala kegiatan berjalan. Baik pada awal kegiatan ataupun pada akhir kegiatan yang telah dilakukan.

Tercapainya tujuan pendidikan disekolah dapat membawa dampak pada kemaslahatan bersama, baik pemerintah ataupun masyarakat. Karena terciptanya sumber daya manusia yaitu peserta didik yang memiliki kualitas sumber daya untuk menghadapi kemajuan zaman seperti sekarang ini. Baik dalam segi hal akademik pada peserta didik, ataupun non akademisi. pengembangan kualitas peserta didik ditentukan dengan kegiatan/program yang berjalan disekolah, yang tentunya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya peserta didik baik dalam segi hal akademisi ataupun non akademis.

Keberadaan sebuah perencanaan dalam proses manajemen pembiayaan disekolah sangatlah penting keberadaannya. Dengan adanya perencanaan pada pembiayaan pendidikan maka seluruh pengeluaran ataupun pemasukan yang berupa sumber daya (input) baik dalam bentuk uang ataupun barang dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini bertujuan agar dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, menghindari adanya pemborosan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengeluaran biaya terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, yaitu pendidikan yang bermutu.

Perencanaan pada suatu program/kegiatan merupakan pola dasar. Penentuan sasaran yang akan dicapai dimulai dengan perencanaan yang dilakukan. Selanjutnya perencanaan juga menjadi acuan pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan yang akan dilakukan direncanakan dengan matang. Menentukan apa saja yang akan dilakukan nantinya pada proses pelaksanaan yang akan dijalankan. Semua kegiatan yang hendak dilakukan dimulai dengan perencanaan yang matang.

Dapat dikatakan bahwa adanya perencanaan dalam sebuah pembiayaan sangatlah penting keberadaannya. Dengan adanya perencanaan pada pembiayaan maka seluruh pengeluaran ataupun masukan yang berupa sumber daya (input) baik berupa barang atau uang dapat dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hal yang terpenting dalam penyusunan anggaran yaitu bagaimana memanfaatkan dana yang ada secara efisien. Mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.

Hal ini bertujuan agar dana yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Tidak adanya pemborosan dalam pengeluaran anggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Menghindari adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengeluaran biaya yang berlebihan. Ditunjukkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Selain perencanaan berfungsi sebagai pola dasar pada sebuah kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan, perencanaan juga dapat dikatakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan tentang cara mencapai tujuan. Artinya perencanaan pendidikan tidak terhenti pada saat tersusunnya dan disetujuinya rencana itu oleh pengambil keputusan, akan tetapi erat hubungannya dengan saat implementasinya.

Dari uraian diatas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yaitu proses pengumpulan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang telah ditentukan terkait dengan pendapatan biaya dan pengeluaran yang akan dilakukan.

Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu: Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya-sumber daya yang secara tidak efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.

Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur

kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.

Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.⁴¹

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Kedua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan anggaran pembiayaan berbasis madrasah atau sering disebut Anggaran Belanja Madrasah (ABM) Anggaran (*budget*) merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu.¹⁸ Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

⁴¹T. Hani Handoko, MBA., *Manajemen*, (Yogyakarta, 2003), edisi 2, hlm. 167.

- b. Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga.
- c. Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggran sebelumnya.
- d. Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.

Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan. Melalui RAPBS/M ini dapat diketahui satuan biaya pendidikan⁴² yang diperlukan oleh lembaga pendidikan.

Format-format penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yang meliputi: (1) sumber pendapatan terdiri dari Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), Dana Pembangunan Pendidikan (DPP), Operasi Perawatan

⁴²Satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (*unit cost*) merupakan rata-rata biaya per siswa per satu tahun dalam satu tahun ajaran di lembaga pendidikan. Lihat Dedi Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fasilitas (OPF) dan lain-lain. (2) pengeluaran untuk kegiatan untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber esensial seperti:

- a) Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat
- b) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan
- c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan
- d) Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.
- e) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)

Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pada tingkat kelompok kerja Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran

kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

- b. Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM.
- c. Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan⁴³.

2. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau *accounting*. Pembukuan merupakan pusat informasi keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 mendefinisikan pembukuan sebagai berikut “Proses Mencatat Data dan Informasi Keuangan”.⁴⁴

⁴³Departemen Agama, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Bandung: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Sekolah, 2003), hlm.116-119

⁴⁴ Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI “*Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah*” (Jakarta: Maret 2011), h. 187

Dari defenisi diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan ialah proses mencatat yang berkaitan dengan informasi data keuangan baik dari biaya yang telah diperoleh atupun biaya yang telah digunakan disajikan dengan bentuk laporan tertulis.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran.

Penerimaan yang berkaitan dengan dana yang telah diperoleh harus dibukukan secara jelas, sesuai dengan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepkati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas⁴⁵

Ada beberapa komponen yang perlu di biayai dengan menggunakan uang dari dana belajar. Komponen-komponen tersebut meliputi :

- a. Honorarium untuk pemimpin atau penanggungjawab edukatif

⁴⁵ E Mulyasa, “*Menjadi Kepala Sekolah Profesional*” (Bandung : Pr Remaja Rosdakarya, 2009) Cet. 10 h. 201-203

- b. Honorarium untuk sumber belajar
- c. Honorarium untuk pemimpin umum lembaga diklusemas
- d. Honorarium untuk pinata usaha dan pembantu-pembantunya
- e. Biaya perlengkapan dan peralatan
- f. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana
- g. Biaya sewa atau kontrak
- h. Dana untuk mengembangkan usaha lembaga diklusemas
- i. Biaya-biaya lain untuk pengembangan dan biaya tak terduga

Dari pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hal pengalokasian anggaran diantaranya yaitu melalui proses belajar mengajar yang terdapat disekolah. Salah satu penentu tercapainya tujuan sekolah yaitu lewat proses Kegiatan Belajar Mengajar atau biasa yang disebut KBM di dalam kelas.

Karena KBM yang terdapat didalam kelas terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Penyaluran pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik terjadi pada proses KBM. Dengan kata lain proses KBM yang terjadi di dalam kelas sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan sekolah yang diharapkan.

Harus adanya dukungan dalam fasilitas dalam Kegiatan Belajar Mengajar didalam kelas, terkhusus dalam segi hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang proses tersebut. Dari mulai perlengkapan media pembelajaran sampai pada metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Dalam hal ini, tentunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biaya sangat dibutuhkan sekali keberadaannya dalam pengalokasian untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang terdapat didalam kelas, untuk menunjang proses belajar mengajar yang berjalan efektif dan efisien.

Segala pengeluaran dalam pembiayaan pendidikan terkhusus sekolah tidak hanya terbatas pada kegiatan yang formal saja seperti kegiatan belajar mengajar (KBM), akan tetapi ada beberapa kegiatan informal yang harus dibiayai dalam pelaksanaannya. Hal ini diperuntukan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu peserta didik.

Peningkatan kualitas peserta didik tidak hanya terbatas pada kegiatan yang memang sudah ada di sekolah atau didalam sekolah, akan tetapi perkembangan bakat siswa dapat dikembangkan lewat kegiatan diluar sekolah atau ekstra kurikuler. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit nominalnya, akan tetapi butuh dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi dari sumber daya manusia yang berkompeten, dukungan baik moril maupun materil.

Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maka dibuatnya laporan untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Laporan mulai dari biaya yang terkecil sampai yang terbesar dalam nominalnya. Harus disajikan sejelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mungkin dalam bentuk pembukuannya. Agar tidak adanya kekeliruan dalam hal pengeluaran yang telah dilakukan.

Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah memadukan antara aturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak bisa di rubah oleh pihak sekolah dalam hal pengalokasian anggaran. Dalam hal ini pihak sekolah hanya beritindak sebagai pelaksana pengguna.

Dilain hal dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah memiliki kewenangan dan keleluasan untuk mengelola dana dalam mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah.

Pembukuan mencakup dua hal, yaitu : pengurus yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis pengurus kedua disebut juga dengan pengurus bendaharawan.

Hal yang menyangkut dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan.

Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.

Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat di nilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.⁴⁶

Di lain hal, fungsi kepala sekolah dapat dikatakan sebagai manajerial yang berwenang dalam segi hal penggunaan dana yang telah diperoleh, yang kemudian menunjuk satu bendaharawan untuk membuat laporan anggaran untuk nantinya dipertanggungjawabkan.

Dapat dikatakan, manajemen pembiayaan disekolah dibebankan kepada kepala sekolah. Karena memang kepala sekolah berperan sebagai pemberi wewenang sekaligus penanggungjawab penuh terhadap anggaran yang telah diterima ataupun yang telah dikeluarkan. Untuk operasional, manajemen pembiayaan di sekolah biasa dikelola oleh bendaharawan yang melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada suatu sekolah yang mempunyai keterlibatan terkait tentang pembiayaan pendidikan yaitu dua hal. Bendahara berfungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ E Mulyasa, “*Manajemen Berbasis Sekolah*” (Bandung : PT Rosdakarya, 2007) Cet, 11h. 49



sebagai penanggungjawab segala penggunaan anggaran yang dikeluarkan yang dilanjutkan dengan membuat pembukuan sesuai dengan standar, yang kemudian untuk di laporkan dan dipertanggungjawabkan segala biaya yang telah dikeluarkan. Baik dalam bentuk barang ataupun jasa yang dinominalkan. Kepala sekolah sebagai pemberi wewenang dalam penggunaan anggaran. Segala pengeluaran yang akan dilakukan harus mempunyai wewenang dari pimpinan dalam hal ini ialah kepala sekolah. Karena memang kepala sekolah memiliki hak sebagai pemberi wewenang yang kaitannya dalam pembiayaan pendidikan disekolah.

Bendaharawan harus mengetahui apa saja yang terkait tentang pembukuan dalam hal penggunaan biaya. Hal ini perlu dilakukan agar adanya kejelasan biaya yang telah dikeluarkan, baik dalam kategori yang nominalnya kecil atau yang nominalnya besar. Disalurkan dalam hal apa saja biaya yang telah digunakan. Dilain hal untuk menyusun laporan sejelas mungkin agar nantinya laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

a. Penerimaan

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ada beberapa karakteristik yang identik.

Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya menganut pola panduan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makro kelembagaan. Dengan demikian, pola manajemen keuangan sekolah terbatas pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah, maka sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada umumnya disetiap sekolah telah ditetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD), ditunjuk bendahara oleh pihak berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar setelah mendapat perintah dari atasan langsung.

Sedangkan uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengan persetujuan musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yang berasal dari masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harus mendapat persetujuan komite sekolah.

b. Pengeluaran

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat.

Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalen keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang maksud-maksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan perspektif tersebut perencanaan keuangan sekolah harus dapat membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara pencapaiannya.

Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁴⁷

3. Pengawasan

⁴⁷E Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 201-204



Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.⁴⁸

Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi⁴⁹

Dari beberapa pengertian di atas jika dikaitkan dengan proses pembiayaan pendidikan disekolah, pengawasan ialah proses mengawasi atau memantau segala kegiatan, untuk memastikan rencana tujuan awal dapat tercapai. Dengan melakukan pengawasan pihak sekolah mampu mengetahui sejauh mana proses pengelolaan pembiayaan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan efisien. Apakah anggaran yang telah direncanakan pada tahap awalnya mampu dialokasikan dan dimanfaatkan dengan baik.

Konsep dasar tentang pengawasan anggaran memiliki tujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya, dan pada tahap

⁴⁸ Fahmi, *Opcit.*, h. 84

⁴⁹ Kurniadin dan Machali, *Opcit.*, h. 367

tingkat penggunaannya. Dengan adanya pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang ada. Disisi lain menghindari adanya pemborosan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, segala biaya yang dipergunakan harus mempunyai dampak yang signifikan dalam perkembangan sumber daya manusianya.

Dalam kebijakan umum pengawasan departemen pendidikan dan kebudayaan (Rekernas, 1999), dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut :

- a. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program bidang organisasi.
- b. Hasil temuan pengawasan harus ditindak lanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawas dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi.
- c. Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan bisa memperhatikan aspek manajemen.
- d. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konseptual dan menyeluruh.
- e. Kegiatan pengawasan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data atau informasi yang sangat tinggi.
- g. Tepat waktu, artinya data yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan.
- h. Objektif dan komprehensif
- i. Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi.
- j. Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat.
- k. Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁵⁰

Dengan adanya sistem pengawasan yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional dan kebudayaan maka dapat memudahkan kepada pihak sekolah untuk melakukan kegiatan pengawasan, karena sistem tersebut dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan pengawasan.

Adanya kebijakan pemerintah tentang standarisa pengawasan memudahkan pihak sekolah dalam memantau pembiayaan pada suatu sekolah. Akan tetapi komitmen yang menentuka dapat berjalan baik atau tidaknya pengawasan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah.

⁵⁰ Fatah, "Ekonomi...", *Opcit.*, h. 65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, perbelanjaan, perhitungan, dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Dari pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan terkait dengan pengawasan pembiayaan pendidikan, bahwa segala bentuk kegiatan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan disekolah harus diawasi sepenuhnya, melalui aliran masuk dan keluarnya anggaran yang dilakukan. Mulai dari anggaran yang dialokasikan pada bentuk kegiatan ataupun berbentuk barang dan jasa.

Segala bentuk kegiatan yang terdapat pada proses pendidikan yang berjalan disekolah terkhusus kegiatan pembiayaan pendidikan yang dalam hal ini adalah pembukuan harus diawasi secara mendetail. Hal ini dilakukan untuk memastikan berjalan secara efektif dan efisien.

Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan Bawasda.

Hal di atas menjelaskan bahwa setiap sekolah memiliki Tim pengawas yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, untuk mengawasi sekolah yang ditunjuk. Pengawas yang ditunjuk oleh kepala kantor untuk melaksanakan tugas mengawasi pada sekolah yang ditetapkan. Selain itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



komite sekolah mengawasi pula segala proses kegiatan yang berjalan disekolah.

Menurut T Hani Handoko ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu :
 pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik.⁵¹

a. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan ini dapat diterapkan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dan menyimpang dari tujuan awal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah sebelum kegiatan pendayagunaan anggaran selesai dilaksanakan. Pengawasan ini mengharuskan pihak sekolah untuk lebih aktif dan agresif atau peka, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah yang berkenaan dengan masalah anggaran itu terjadi. Pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan ini dilakukan disaat kegiatan sedang berlangsung, disaat melihat penyimpangan terjadi maka pihak sekolah langsung berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

c. Pengawasan umpan balik

Pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil dari kegiatan penganggaran yang telah dilaksanakan.

⁵¹ T. Hani Handoko dasar- dasar proses pengawasan BPFE Yogyakarta 2012

Dapat disepakati bersama bahwa proses pengawasan tidak hanya sebatas pada pengawasan awal dan akhir saja.

Dapat dikatakan bahwa proses pengawasan tidak hanya sebatas pada pengawasan yang ada pada awal atau akhir kegiatan. Proses pengawasan dapat terjadi juga pada proses berjalannya kegiatan yang sedang berjalan. Adanya proses pengawasan semata-mata ditunjukkan untuk mengukur berjalan atau tidaknya perencanaan yang ditetapkan pada awalnya. Jika memang berjalan maka tujuan telah tercapai, akan tetapi jika tidak tujuannya yang telah ditentukan mengalami hambatan dalam proses berjalannya.

Menurut Nanang Fattah, langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu

- 1) Penetapan standar atau patokan yang digunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.
- 2) Mengukur dan membandingkan.
- 3) Mengidentifikasi penyimpangan.
- 4) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.⁵²

Tahapan proses pengawasan yang dijelaskan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tahapan pengawasan dalam suatu anggaran tidak hanya sebatas pada berjalan atau tidaknya rencana yang ditetapkan pada awalnya. Akan tetapi harus melihat pada tiga aspek, yaitu kuantitas,

⁵² Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan: Penerbit: Pt Remaja Rosdakarya,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kualitas biaya dan waktu dalam penetapan yang ditetapkan pada awalnya. Adanya proses mengukur dan membandingkan dalam proses pengawasan kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi dari sebelumnya atau tidak, Dalam pencapaian tujuannya.

Hambatan dalam proses berjalannya kegiatan yang dilakukan sudah barang tentu. Langkah yang kemudian harus dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam pengawasan adalah mengidentifikasi segala hambatan didalam proses berjalannya kegiatan yang telah dilakukan. Hambatan yang ada mempengaruhi atau tidak dalam peningkatan sumber daya manusianya.

Harus ditindak lanjuti jika memang terjadi hambatan dalam sebuah program yang berjalan. Dengan mencari alternatif jalan keluar yang baik, yang kemudian hambatan tersebut dipelajari agar nantinya dapat diantisipasi jika memang suatu saat didapati hambatan yang sama pada program yang dilakukan.

4. Evaluasi dan Pertanggungjawaban
 - a. Evaluasi

Langkah terakhir adalah evaluasi bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan di dalam: tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang



tersedia⁵³ Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA. Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah.

Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistik penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi di setiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.

b. Pertanggungjawaban

⁵³Wahyosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah di laksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan
- b. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
- c. Kantor Dinas pendidikan .

Pertanggungjawaban yang dikenal dengan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketepatan waktu. Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik⁵⁴.

Jadi dalam kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan.

B. Penelitian yang relevan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Madrasah Aliyah Masmur dan Madrasah Diniyah Putri Pekanbaru. Sedangkan obyek kajian penelitian ini adalah tentang manajemen pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah yang sedang peneliti

⁵⁴E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 205-206.

laksanakan. Oleh karena itu, selain berdasarkan pada survai dan data-data yang diperoleh, peneliti juga berpijak pada kajian serta penelitian yang telah di lakukan sebelumnya.

1. Penelitian Fatur Rohman, tahun 2008 yang berjudul “Studi tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”. Tesis ini menjelaskan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di internal madrasah atau yayasan menjadi sangat terbantu dengan adanya program BOS. Pesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama membahas tentang manajemen pembiayaan sedangkan perbedaannya adalah Fatur Rohman adanya program BOS sedangkan yang peneliti lakukan adalah pembiayaan keseluruhan termasuk dana BOS.
2. Penelitian Muhlisin, tahun 2007 yang berjudul “Studi tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2005/2006”. Tesis ini menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui perencanaan keuangan madrasah, pelaksanaan keuangan madrasah, evaluasi keuangan madrasah. Pesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama membahas tentang manajemen sedangkan perbedaannya adalah Muhlisin adanya khusus keuangan sedangkan yang peneliti lakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Manajemen pembiayaan keseluruhan termasuk manajemen keuangan.

3. Penelitian Siti Faikoh, tahun 2006 yang berjudul “Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al-Khoiriyah 2 Semarang”. Tesis ini menjelaskan pelaksanaan manajemen pendidikan sudah sangat baik, namun konsep manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara utuh, untuk itu diperlukan peningkatan mutu pada madrasah yang meliputi manajemen kesiswaan, kurikulum, tata usaha, sarana prasarana, kepegawaian, keuangan dan hubungan masyarakat, serta adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara madrasah, masyarakat dan yayasan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada. Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Pada Yayasan se kecamatan sukajadi Pekanbaru (Madrasah Aliyah Masmur dan Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru)

C. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam maksud penelitian ini, maka teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini di operasional kan. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat

- b. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan
 - c. Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan
 - d. Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.
 - e. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)
2. Pelaksanaan
 - a. Penerimaan
 - b. Pengeluaran
 3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban
 - a. Evaluasi
 - b. Pertanggung Jawaban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.